

KLIPING BERITA KEGIATAN KONSULTASI RUU DESA	
Nama Media	KOMPAS
Edisi	Selasa, 4 Maret 2008
Rubrik	Nusantara
Halaman	24

PEMERINTAHAN

Pemekaran Desa Tak Perhatikan Ekonomi Desa

MEDAN, KOMPAS — Pemekaran daerah tak hanya berkaitan dengan pembentukan provinsi atau kabupaten/kota baru, tetapi juga desa. Pemekaran desa bahkan bisa dibilang jauh lebih marak dan sebagian besar tak memperhitungkan skala ekonomi desa. Ini tentunya memprihatinkan, mengingat dampaknya adalah ekonomi desa bukan bertambah kuat, tetapi justru semakin lemah.

Ketua Badan Pengarah Forum Pengembangan Pembaharuan Masyarakat Desa yang juga anggota Tim Pakar Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Departemen Dalam Negeri, Sutoro Eko, mengemukakan hal itu dalam "Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa", Senin (3/3) di Medan, Sumatera Utara. "Untuk memekarkan atau menggabungkan desa, skala ekonomi seharusnya menjadi pertimbangan yang penting," katanya mengingatkan.

Sutoro mencontohkan, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan ukuran desa yang ideal. Di Yogyakarta, satu desa mempunyai sekitar 8.000 keluarga. "Kondisi yang tidak ideal terjadi di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Satu desa memiliki sekitar 3.000 keluarga. Jumlah keluarga yang kecil akan memperlemah skala ekonomi desa terkait," ujarnya.

Sutoro juga menyebutkan, Sumatera Barat berhasil meningkatkan skala ekonomi desa ketika

sistem nagari dikembalikan. Sebelum sistem nagari diberlakukan, provinsi ini memiliki 5.000 desa. Kini hanya 600 nagari. "Dengan jumlah itu, skala ekonominya meningkat," tuturnya.

Kondisi yang berbeda terjadi di Papua. Di wilayah tertimur Indonesia ini, pemekaran desa banyak yang tidak disertai dengan alasan yang kuat. "Di salah satu kabupaten bahkan ada yang memekarkan 50 desa menjadi 500 desa," kata Sutoro.

Jumlah keluarga

Prasetyanto dari Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Departemen Dalam Negeri dalam kesempatan serupa mengatakan, pemekaran desa hingga kini masih terus terjadi. Sebab, mudah sekali memekarkan desa. Syarat pemekaran salah satunya adalah penduduk satu desa minimal 75 keluarga.

Ke depan, lanjutnya, pemerintah akan memperketat pemekaran daerah. "Ada syarat lagi yang harus dipenuhi, yaitu kondisi geografis dan masalah pengelolaan. Kalau tak memenuhi syarat itu, pemekaran perlu ditunda," kata Prasetyanto.

Tentang kondisi geografis yang dimaksud, menurut Prasetyanto, contohnya, antara lain, adalah apabila ada kelompok warga dengan jumlah besar kesulitan berkomunikasi dengan desa induk akibat kondisi geografis, kemungkinan desa tersebut bisa dimekarkan. (MAR)